

Pengaruh Rasio Kemandirian Daerah Dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau

Author:

Doni Hakiki¹, Tumija², Ika Agustina³

Affiliation:

Institut Pemerintahan Dalam Negeri^{1,2,3},
Jl. Raya Ir. Sokarno Km. 20 Jatinangor Sumedang Jawa Barat

Email :

donihakiki@ipdn.ac.id¹, tumija@ipdn.ac.id², ika_agustina@ipdn.ac.id³

ABSTRACT

The purpose of this study was to examine how much influence the regional independence and regional expenditure partially and simultaneously have on the financial performance of the local government of Sekadau Regency. The research method used is descriptive quantitative with a causal design and explanatory research. The results state that: (a) Variable X1 has an effect of -0.059 on variable Y, with a non-unidirectional effect because the Beta coefficient value shows a minus sign, while the significance value is 0.511 (greater than 0.05) which means that there is no significant research effect. significant, (b) Variable X2 has an effect of -0.907 on Variable Y, the Beta coefficient indicates that the effect is not in line with the significance value, namely 0.000 (less than 0.05) meaning that there is a significant effect, (c) Simultaneously the X1 variable and X2 affects the Y variable by 99.6%. Then it can be concluded that the X1 variable has no significant effect on the Y variable with an effect of -0.059 and a non-unidirectional effect, while the X2 variable has a significant effect on the Y variable of -0.907 with a non-unidirectional effect. However, simultaneously the variables X1 and X2 both have an influence on the Y variable, which is 99.6%.

Keywords: regional independence, regional expenditures regional financial performance.

ABSTRAK

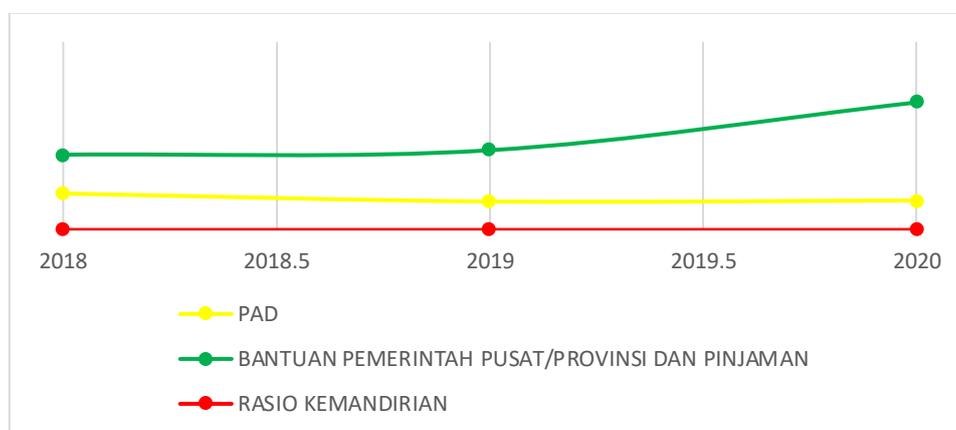
Tujuan penelitian dilakukan untuk menguji seberapa besar pengaruh yang ditimbulkan dari rasio kemandirian daerah dan belanja daerah secara parsial dan secara simultan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Sekadau. Metode penelitian yang digunakan kuantitatif deskriptif dengan desain kausal dan *explanatory research*. Hasil penelitian menyatakan bahwa: (a) Variabel X1 berpengaruh sebesar -0,059 terhadap variabel Y, dengan pengaruh yang tidak searah karena nilai *coefifisients Beta* menunjukkan tanda minus, sedangkan nilai signifikansi sebesar 0,511 (lebih besar dari 0,05) yang artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan, (b) Variabel X2 berpengaruh sebesar -0,907 terhadap Variabel Y, *coefifisients Beta* menunjukkan nilai yang minus yang berarti bahwa pengaruh yang ada tidak searah dengan nilai signifikansinya yaitu 0,000 (lebih kecil dari 0,05) artinya terjadi pengaruh yang signifikan, (c) Secara simultan variabel X1 dan X2 berpengaruh terhadap variabel Y sebesar 99,6%. Maka diperoleh kesimpulan bahwa variabel X1 tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y dengan pengaruh sebesar -0,059 dan pengaruh yang tidak searah, sedangkan variabel X2 berpengaruh signifikan terhadap variabel Y sebesar -0,907 dengan pengaruh yang tidak searah pula. Namun secara simultan variabel X1 dan X2 sama-sama memiliki pengaruh terhadap variabel Y yaitu sebesar 99,6%.

Kata Kunci: kemandirian daerah, belanja daerah, kinerja keuangan daerah.

PENDAHULUAN

Kemampuan keuangan daerah pada penyelenggaraan otonomi kerap kali dijadikan standar yang menentukan keberhasilan pemerintah daerah melaksanakan otonomi daerah tersebut. Kemampuan keuangan diukur melalui realisasi pendapatan asli daerah, apabila dari waktu ke waktu pendapatan asli daerah meningkat secara konsisten dan dapat memenuhi berbagai kebutuhan daerah maka dapat dikatakan telah memiliki kemampuan keuangan. Pengukuran kemampuan atas keuangan suatu daerah ialah dengan menghitung rasio keuangan yang terdiri dari beberapa bagian. Mahmudi (2019) mengemukakan “dengan mengacu pada PAD, untuk mengukur kemampuan keuangan digunakan beberapa rasio keuangan antara lain: Rasio Derajat Desentralisasi, Rasio Derajat Ketergantungan dan Rasio Kemandirian Keuangan serta Rasio Efektifitas pengelolaan PAD”. Hal tersebut tentu sangat membantu untuk melihat kemampuan daerah demi mewujudkan keberhasilan atas otonomi daerah. Jika melihat pada hasil analisa terhadap kemampuan keuangan daerah Kabupaten Sekadau pada masa sekarang ini masih terbilang rendah, hal tersebut bisa dilihat pada gambar diagram berikut ini:

Gambar 1
Diagram Pencar hasil analisis Rasio Kemandirian Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2018-2020



Sumber: Output Excel LRA 2018-2020 (Diolah oleh penulis)

Berdasarkan diagram tersebut dapat dilihat bahwa *trend* dari PAD mengarah kepada penurunan jika dibanding tahun sebelumnya yakni realisasi PAD pada tahun 2018 sebesar 58.087.969.584,22 (85%), tahun 2019 sebesar 45.360.926.218,14 (64%) dan 46.978.872.151,02 (65%) di tahun 2020, hal tersebut tidak diimbangi dengan peningkatan dana bantuan atau pinjaman yang masuk, fenomena ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat ataupun dana eksternal lainnya masih sangat tinggi. Oleh karena itu, implikasinya pada hasil analisis rasio kemandirian pemda Kabupaten Sekadau tersebut menunjukkan tidak ada terjadinya kenaikan, yang berarti bahwa kemampuan keuangannya yang masih sangat rendah. Meningkatnya rasio kemandirian maka akan

berakibat pada peningkatan kiprah partisipasi masyarakat dalam membayar retribusi dan pajak yang merupakan komposisi sangat krusial pada PAD. Permasalahan turunya PAD disebabkan pemerintah daerah belum optimal menggali dan mengelola potensi daerah yang ada. Selain itu, partisipasi masyarakat masih rendah dalam membayar retribusi dan pajak daerah. Faktor lain rendahnya PAD karena tahun 2020-2021 terjadinya pandemi Covid 19 sehingga perekonomian masyarakat terhambat. Atas dasar uraian tersebut penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian di Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat, daerah yang mempunyai potensi jalur transportasi segitiga yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Kabupaten Sekadau resmi berdiri pada tanggal 18 Desember 2003 setelah melakukan pemekaran dari Kabupaten Sanggau.

Pada penelitian ini menggunakan dua rasio dalam menghitung kinerja keuangan dikarenakan penulis hanya menyoroti pada dua rasio tersebut serta terbatasnya waktu dan biaya. Adapun tujuan penelitian ini mengetahui seberapa besar pengaruh Variabel X1 yakni Rasio Kemandirian Daerah, Variabel X2 yaitu belanja daerah secara parsial dan simultan terhadap Variabel Y yaitu Kinerja Keuangan.

TINJAUAN PUSTAKA

Rasio Kemandirian Daerah

Rasio kemandirian dinyatakan oleh besarnya PAD dibandingkan dengan pendapatan daerah yang bersumber pada pendapatan lain seperti hibah atau bantuan pemerintah pusat dan bantuan pemerintah provinsi. Rumus yang diterapkan dalam menghitung rasio kemandirian daerah ialah berdasarkan teori (Halim, 2012). Adapun rumus rasio kemandirian daerah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Transfer Pusat + Provinsi + Bantuan}} \times 100$$

Adapun tingkat kemandirian daerah seperti pada tabel 1 di bawah ini

Tabel 1
Tingkat Kemandirian Daerah

Kriteria Kemampuan Keuangan	Rasio Kemandirian (%)
0-25	Rendah sekali
25-50	Rendah
50-75	Sedang
75-100	Tinggi

Sumber: Mahmudi (2004:189)

Rasio Belanja Daerah

Belanja Daerah dikelola guna melihat apakah pendapatan yang diterima oleh daerah diserap dengan maksimal, efektif dan efisien. Sebagai perbandingan belanja pemerintah daerah tidak lebih besar dari total pendapatan (Welly & Djuniar, 2017). Artinya belanja dianggarkan sesuai porsi dari kebutuhan daerah, seluruh belanja disusun dalam APBD dengan memperhatikan program dan prioritas pembangunan daerah. Adapun rumus yang digunakan dalam menghitung rasio pengelolaan belanja daerah (PDB) yaitu:

$$PDB = \frac{\text{Total Pendapatan Daerah}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Kinerja Keuangan Daerah

Pengukuran kinerja keuangan suatu daerah bisa diukur dengan menilai apakah efisiensi atas pengelolaan keuangan yang digunakan pada urusan pemerintahan, pembangunan infrastruktur, fasilitas dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sudah dilakukan secara optimal atau tidak. Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan output dan input atau realisasi pengeluaran dengan realisasi penerimaan daerah (Hamzah, 2007). Dari teori tersebut, menggambarkan bahwa “semakin tinggi rasio efisiensi maka semakin buruk kinerja”, sedangkan “semakin rendah rasio efisiensinya maka hal tersebut menunjukkan kinerja yang baik”. Berdasarkan pernyataan tersebut maka diperoleh rumus Kinerja Keuangan Daerah (KKD) yaitu:

$$KKD = \frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Realisasi Penerimaan}} \times 100\%$$

Adapun tabel kriteria kinerja keuangan sebagaimana tabel 2 sebagai berikut :

Tabel 2
Kriteria Kinerja Keuangan

Rasio (%)	Kriteria Kinerja
>100	Tidak Efisien
90-100	Kurang Efisien
80-90	Cukup Efisien
60-80	Efisien
<60	Sangat Efisien

Sumber: Hamzah (2007)

Penelitian Terdahulu

Anynda dan Hermanto (2020) penelitiannya yaitu Pengaruh Rasio Kemandirian Daerah, Efektifitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Pengelolaan Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah. Hasil penelitian secara parsial baik rasio kemandirian daerah, efektivitas PAD dan pengelolaan belanja daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah. Secara simultan

semua variabel independek berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah sebesar 79,3%”. Dessy Ari Permatasari, Sri Trisnaningsih (2022), Pengaruh Kemandirian, efektifitas Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa Rasio Kemandirian Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Daerah. Dalam hal ini adanya pengaruh rasio kemandirian daerah terhadap kinerja keuangan daerah menunjukkan bahwa tingkat suatu kemandirian suatu daerah mempengaruhi kinerja keuangan daerah tersebut. Efektifitas Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Daerah.

Pengaruh efektifitas pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan daerah menunjukkan bahwa perolehan pendapatan daerah yang optimal dapat meningkatkan kinerja keuangan daerah. Pengelolaan Belanja Daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah. Pengaruh pengelolaan belanja daerah terhadap kinerja keuangan daerah menunjukkan bahwa semakin pemerintah daerah secara optimal menekan biaya realisasi belanja, maka dapat berimplikasi padakinerja keuangan daerah. Berti Indah Sari, Halmawati (2021), Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. Hasil penelitian pertama, pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil pengujian PAD ini sesuai dengan teori dan hipotesis sebelumnya yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Kedua, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dana alokasi umum (DAU) berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

METODE

Metode penelitian ini adalah deskriptif melalui pengujian hipotesis dengan menggunakan desain kausal. Sugiyono (2017) menyatakan bahwa “desain kausal yaitu hubungan yang sifatnya sebab akibat”, mempunyai makna bahwa dalam hal ini ada variabel independen, variabel yang memberi pengaruh kepada variabel dependen yaitu rasio kemandirian daerah dan belanja daerah, dan untuk variabel dependennya yakni kinerja keuangan daerah.

Jenis penelitian yang diterapkan yaitu penelitian eksplanatori (*explanatory research*). Menurut Sugiyono (2017) “*explanatory research* ialah metode penelitian yang dimaksudkan untuk menjelaskan pengaruh antara variabel satu dengan variabel lainnya serta kedudukan variabel-variabel yang diteliti”. Alasan penulis menggunakan metode penelitian *explanatory* yakni untuk menguji hipotesis yang ada, oleh sebab itu hendaknya dari penelitian ini bisa

menjelaskan pengaruh antara variabel independen dan dependen yang ada di dalam hipotesis. Operasionalisasi Variabel yang digunakan adalah sebagai berikut :

Tabel 3
Operasional Variabel Penelitian

Variabel	Definisi	Indikator & Pengukuran	Skala
Rasio Kemandirian Daerah (X₁)	Rasio Kemandirian ialah kemampuan daerah dalam memenuhi kebutuhan daerah dengan dibiayai oleh pendapatan asli daerah.	$RKD = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Transfer}} \times 100\%$ (Halim, 2012)	Rasio
Belanja Daerah (X₂)	seluruh kewajiban daerah yang dianggap sebagai sesuatu yang mengurangi nilai kekayaan netto dalam satu periode anggaran yang digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat	$PBD = \frac{\text{Total Pendapatan Daerah}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$ (Welly dan Djuniar, 2017)	Rasio
Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y)	Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan capaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan sistem keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran” (Sari, 2016)	$KKD = \frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Realisasi Penerimaan}} \times 100\%$ (Hamzah, 2007)	Rasio

Sumber: Diolah Penulis, 2021

Populasi pada penelitian ini yaitu pemerintah daerah Kabupaten Sekadau, sampel yang diambil yakni laporan keuangan. Moenek dkk (2020) menyatakan bahwa “bentuk laporan keuangan pada pemerintah daerah terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)”. Kriteria pada pengambilan sampel penelitian menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel data yang didasarkan pada pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2017). Teknik *purposive sampling* yakni teknik pemilihan sampel didasarkan pada pertimbangan oleh peneliti sendiri mengenai sampel

yang paling cocok, tujuannya agar sampel yang diambil dapat bersifat lebih relevan dengan pendekatan penelitian ini.

Ketentuan pemerintah daerah tersebut ialah memiliki data yang lengkap yang dibutuhkan pada penelitian ini yaitu Laporan Realisasi Anggaran (LRA) untuk memperoleh total Pendapatan Daerah, Pendapatan Transfer/Bantuan dan Belanja Daerah. Sedangkan sumber data yang digunakan sumber data skunder yang berupa data kuantitatif yaitu data yang dapat dihitung secara langsung oleh penulis. Data kuantitatif merupakan data yang berbentuk angka yang bisa diukur satuan hitung. Data kuantitatif pada penelitian ini yaitu Laporan Realisasi Anggaran (LRA) untuk mendapatkan PAD, Pendapatan Transfer, dan Belanja Daerah. Penulis disini melakukan penelitian menggunakan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi dan studi kepustakaan.

Selanjutnya teknik analisis data menggunakan model *statistic parametris*. Statistik parametris digunakan dalam menguji parameter populasi melalui statistik, ataupun uji ukuran populasi melalui data sampel. Teknik analisis yang diterapkan pada penelitian ini diantaranya Regresi Linear Berganda, Uji Asumsi Klasik, Uji Kelayakan Model dan Uji Hipotesis yang dilakukan dengan cara menganalisis data *output* hasil perhitungan statistik oleh program komputer SPSS (*Statistical Product and Service Solution*) for windows version 25.

Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda diterapkan oleh peneliti, apabila peneliti meramalkan bagaimana naik turunnya keadaan variabel dependen (kriterium), apabila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor *predictor* dinaik turunkan nilainya (dimanipulasi)", (Sugiyono, 2017:275). Analisis regresi linear berganda pada penelitian ini dapat dimodelkan dalam persamaan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan :	α	=	Nilai Konstanta
	Y	=	Kinerja Keuangan pemerintah daerah
	β	=	Koefisien Determinasi
	X_1	=	Rasio Kemandirian Daerah
	X_2	=	Belanja Daerah
	e	=	Koefisien <i>error</i>

Uji Asumsi Klasik

Menurut Widiyanto (2013) "terdapat beberapa asumsi yang harus terpenuhi dalam analisis regresi, yaitu data harus berada dalam distribusi normal, tidak terjadinya autokorelasi dan heteroskedastitas". Uji asumsi klasik ini didukung dan diperkuat dengan perhitungan menggunakan

Software Statistical Product and Service Solution (SPSS) for Windows versi 25. Asumsi klasik pada regresi linear berganda yang dipakai dalam penelitian ini yakni dengan 2 jenis uji berikut ini:

Uji Kelayakan Model

Uji R^2 atau sebutan lainnya yaitu Koefisien Determinasi ialah suatu nilai yang mengukur seberapa besar kemampuan variabel-variabel independen yang digunakan pada persamaan regresi, dalam menjelaskan keanekaragaman variabel dependen. Nilai koefisien determinasi ialah antara nol dan satu. Apabila nilai R^2 yang mendekati satu, hal ini berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memperkirakan variabel dependen. Namun apabila nilai R^2 yang kecil, hal tersebut justru berarti bahwa kemampuan variabel independen dalam variabel dependen memiliki batasan.

Uji F

Uji F biasa dikenal dengan uji ketepatan atau kelayakan model (*goodness of fit*), menurut Ghozali (2016) “uji kelayakan model digunakan untuk menguji apakah terdapat pengaruh signifikan secara keseluruhan terhadap model regresi”. Uji F yaitu hipotesis yang diterapkan guna menguji apakah pada model regresi memiliki pengaruh signifikan yang layak diuji dalam model penelitian. Pengujian dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 0,05 ($\alpha=5\%$). Kriteria penentuan untuk pengambilan keputusan pada uji F ialah Jika nilai Signifikansi F lebih kecil dari 0,05, maka hal tersebut memperlihatkan bahwa di dalam model penelitian, model regresi tersebut layak digunakan.

Uji Hipotesis

Uji hipotesis dalam penelitian ini adalah Uji T, menurut Ghozali (2016) “Uji T diterapkan guna mengetahui pengaruh antar masing-masing variabel independen terhadap dependen. Uji hipotesis ini diterapkan guna mengukur hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen”. Uji statistik T merupakan pengujian secara statistik yang diperuntukan dalam menguji pengaruh secara parsial dari variabel independen terhadap variabel dependen. Dengan ketentuan apabila tingkat probabilitas yang dimiliki kurang dari 0,05 maka dengan begitu bisa dikatakan variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Adapun kriteria terhadap hasil uji T antara lain:

Apabila nilai signifikansi uji T kurang dari 0,05 maka variabel rasio kemandirian daerah atau variabel belanja daerah, berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah Kabupaten Sekadau secara parsial. Apabila nilai signifikansi uji T lebih besar dari 0,05 maka variabel rasio kemandirian daerah atau variabel belanja daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah Kabupaten Sekadau secara parsial.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Rasio Kemandirian Daerah

Rasio kemandirian dinyatakan oleh besarnya PAD dibandingkan dengan pendapatan daerah yang sumbernya daripada pendapatan lain seperti hibah atau bantuan pemerintah pusat dan bantuan pemerintah provinsi. Adapun rumus untuk mengetahui Rasio Kemandirian Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau pada penelitian ini yaitu:

$$RKD = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Transfer}} \times 100\%$$

Berdasarkan perhitungan rumus Rasio Kemandirian di atas, maka Rasio Kemandirian Daerah pemerintah Kabupaten Sekadau dapat ditunjukkan pada tabel 4 berikut ini.

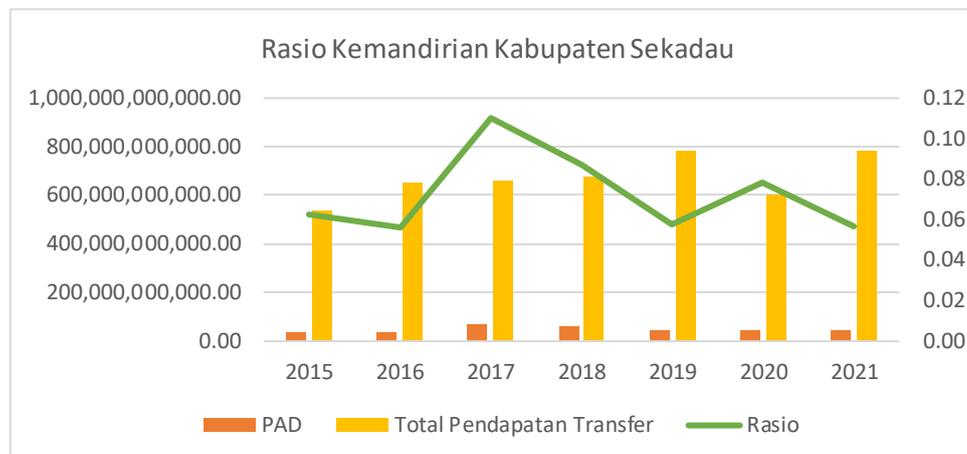
Tabel 4
Analisis Rasio Kemandirian Daerah Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2015-2021

Tahun	PAD	Pendapatan transfer	Rasio	Keterangan
2015	33,509,609,613.42	536,884,031,653.00	6%	Rendah Sekali
2016	36,602,825,350.63	651,858,625,350.00	6%	Rendah Sekali
2017	72,775,859,338.20	660,410,287,860.00	11%	Rendah Sekali
2018	59,087,969,584.22	677,981,716,003.00	9%	Rendah Sekali
2019	45,360,926,218.14	783,155,294,673.00	6%	Rendah Sekali
2020	46,978,872,151.02	600,495,102,565.00	8%	Rendah Sekali
2021	44,974,532,527.78	787,957,365,883.58	6%	Rendah Sekali

Sumber: Data BPKAD Kabupaten Sekadau diolah, 2022

Tabel rasio kemandirian yang disajikan di atas dapat kita ketahui berdasarkan kriteria rasio kemandirian daerah yang disajikan pada tabel 4 bahwa Semakin besar rasio, maka semakin bagus pula tingkat kemandiriannya, begitupun sebaliknya. Apabila nilai rasio semakin kecil, maka semakin buruk pula tingkat kemandiriannya. Dari data yang diperoleh pada tabel di atas sebanyak 7 sampel menunjukkan Rasio Kemandirian Daerah Kabupaten Sekadau yang rendah sekali. Pendapatan yang di terima yaitu pada tahun 2015, 2016, 2019 dan 2021 memiliki tingkat rasio yang sama yakni hanya sebesar 6% dengan kriteria kemampuan keuangan yang “rendah sekali”. Kenaikan PAD tidak cukup mampu untuk merubah kriteria kemampuan keuangan Kabupaten Sekadau yang tetap dalam kategori “rendah sekali”, sebab saat PAD naik Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat juga ikut mengalami kenaikan sehingga besaran rasio kemandiriannya tidak mengalami kenaikan yang signifikan. Untuk melihat lebih jelas fenomena tersebut dapat disajikan pada gambar grafik di bawah ini:

Gambar 2
Grafik Rasio Kemandirian Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2015-2021



Sumber: Data BPKAD Kabupaten Sekadau diolah, 2022

Analisis Rasio kemandirian daerah Kabupaten Sekadau di atas memperlihatkan tingkat kemampuan yang dimiliki pemerintah daerah Kabupaten Sekadau dalam membiayai seluruh kegiatan pemerintahan, baik itu pembangunan daerah ataupun pelayanan bagi masyarakat serta sumber penerimaan daerahnya yang menyatakan bahwa besarnya masih rendah dan pengelolaannya belum optimal.

Belanja Daerah

Belanja Daerah Kabupaten Sekadau dari tahun 2015-2021 dapat dilihat pada tabel 5 berikut:

Tabel 5
Analisis Belanja Daerah Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2015-2021

Tahun	Total Belanja Daerah	Perkembangan	
		Nominal	Persentase
2015	704,739,612,183.17		
2016	831,723,689,408.39	126,984,077,225.22	18%
2017	828,846,393,598.37	-2,877,295,810.02	0%
2018	873,645,816,084.10	44,799,422,485.73	5%
2019	747,231,580,324.59	-126,414,235,759.51	-14%
2020	893,061,691,871.30	145,830,111,546.71	20%

Sumber: Data BPKAD Kabupaten Sekadau diolah, 2022

Berdasarkan tabel 5 tersebut, bisa dilihat bahwasanya Belanja Daerah Kabupaten Sekadau mengalami kondisi yang fluktuatif, terjadi kenaikan dan penurunan setiap tahunnya. Hal ini menggambarkan bagaimana pengelolaan keuangan di Kabupaten Sekadau, APBD yang telah di anggarkan digunakan untuk memenuhi kebutuhan daerah setiap tahunnya. Dari Data tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap tahunnya Pemda Kabupaten Sekadau memiliki tingkat dan besaran kebutuhan yang berbeda dari tahun ke tahun berdasarkan dari jumlah total belanja daerah per tahunnya.

Belanja Daerah dikelola guna melihat apakah pendapatan yang diterima oleh daerah diserap dengan maksimal, efektif dan efisien. “Sebagai perbandingan belanja pemerintah daerah tidak lebih besar dari total pendapatan”, (Welly & Djuniar, 2017) yang artinya belanja dianggarkan sesuai porsi dari kebutuhan daerah, seluruh belanja disusun dalam APBD dengan memperhatikan program dan prioritas pembangunan daerah. Belanja yang dilakukan hendaknya dapat memberikan dampak nyata bagi pembangunan daerah, infrastruktur, fasilitas pelayanan yang berorientasi kepada kesejahteraan masyarakat. Agar terjadi ekuitas antara periode yang positif, belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah tidak melebihi besaran total pendapatan yang diterimanya sehingga tidak terjadi ekuitas yang negatif dalam pengelolaan keuangan daerah khususnya pemerintah daerah Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat. Adapun rumus yang digunakan dalam menghitung rasio pengelolaan belanja daerah (PDB) yaitu:

$$PDB = \frac{\text{Total Pendapatan Daerah}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Hasil perhitungan rasio Pengelolaan Belanja Daerah Kabupaten Sekadau pada tahun 2015-2021 berdasarkan rumus di atas ditunjukkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 6
Rasio Pengelolaan Belanja Daerah Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2015-2021

Tahun	Total Pendapatan Daerah	Total Belanja Daerah	Rasio PDB
2015	717,556,775,742.52	704,739,612,183.17	1.02
2016	782,658,536,474.63	831,723,689,408.39	0.94
2017	844,924,448,240.95	828,846,393,598.37	1.02
2018	885,826,592,485.36	873,645,816,084.10	1.01
2019	877,358,906,891.14	747,231,580,324.59	1.17
2020	890,544,117,514.02	893,061,691,871.30	1.00
2021	871,036,139,694.40	837,479,144,754.00	1.04

Sumber: Data BPKAD Kabupaten Sekadau diolah, 2022

Berdasarkan tabel 6 di atas dapat di lihat bahwa besaran Total Pendapatan Daerah setiap tahunnya terus mengalami kenaikan, hal tersebut justru berbeda jika kita memperhatikan dari besaran Belanja Daerah yang di realisasikan. Belanja Daerah justru mengalami kenaikan dan penurunan setiap tahunnya, pada tabel di atas dalam beberapa sampel seperti tahun 2016, 2018 dan 2020 kita dapat melihat bahwa justru Belanja Daerah memiliki besaran yang jauh melebihi total Pendapatan.

Kinerja Keuangan Daerah

Pengukuran kinerja keuangan suatu daerah bisa diukur dengan menilai apakah efisiensi atas pengelolaan keuangan yang digunakan pada urusan pemerintahan, pembangunan infrastruktur, fasilitas dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sudah dilakukan secara optimal atau tidak. Rasio

efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan output dan input atau realisasi pengeluaran dengan realisasi penerimaan daerah (Hamzah, 2007). Rasio efisiensi yang diterapkan guna mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Sekadau. Penelitian ini didasarkan penelitian yang sebelumnya telah dilakukan oleh Hamzah (2007) dimana kinerja keuangan daerah dinilai dari besaran pengeluaran yang dilakukan daerah terhadap realisasi penerimaan yang diperoleh. Dari teori tersebut, menggambarkan bahwa “semakin tinggi rasio efisiensi maka semakin buruk kinerja”, sedangkan “semakin rendah rasio efisiensinya maka hal tersebut menunjukkan kinerja yang baik”. Berdasarkan pernyataan tersebut maka diperoleh rumus Kinerja Keuangan Daerah (KKD) yaitu:

$$KKD = \frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Realisasi Penerimaan}} \times 100\%$$

Berdasarkan rumus Kinerja Keuangan Daerah (KKD) tersebut maka dapat dilihat nilai dari kinerja keuangan daerah Kabupaten Sekadau sebagai berikut:

Tabel 7
Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2015-2021

Tahun	Realisasi Pengeluaran	Realisasi Penerimaan	Rasio KKD	Keterangan
2015	704,739,612,183.17	717,556,775,742.52	0.98	Kurang Efisien
2016	831,723,689,408.39	782,658,536,474.63	1.06	Tidak Efisien
2017	828,846,393,598.37	844,924,448,240.95	0.98	Kurang Efisien
2018	873,645,816,084.10	885,826,592,485.36	0.99	Kurang Efisien
2019	747,231,580,324.59	877,358,906,891.14	0.85	Cukup Efisien
2020	893,061,691,871.30	890,544,117,514.02	1.00	Kurang Efisien

Sumber: Data BPKAD Kabupaten Sekadau diolah, 2022

Tabel 7 terkait kinerja yang disajikan di atas dapat kita ketahui berdasarkan kriteria efisiensi kinerja pemerintah daerah yang disajikan pada tabel tersebut bahwa semakin kecil nilai rasionya, maka semakin baik tingkat efisiensinya, begitu pula sebaliknya, apabila nilai rasio yang ditunjukkan semakin kecil maka semakin kurang baik tingkat efisiensi yang dimilikinya. Berdasarkan tabel tersebut rata-rata nilai rasio menunjukkan kinerja keuangan daerah Kabupaten Sekadau yang kurang efisien. Hal tersebut dapat kita lihat pada sampel tahun 2015, 2017, 2018, 2020 dan 2021, sedangkan pada tahun 2016 menunjukkan nilai kinerja keuangan yang tidak efisien. Akan tetapi pada tahun 2019 Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Sekadau menunjukkan nilai rasio yang menggambarkan Kinerja Keuangan yang Cukup Efisien.

Hasil analisis kinerja keuangan daerah Kabupaten Sekadau di atas memperlihatkan bahwa nilai output yang dilakukan sama dengan atau bahkan lebih dari nilai input yang diterima. Hal itu menunjukkan bahwa besaran pengeluaran yang dilakukan daerah terbilang besar dan melebihi

penerimaan yang diperoleh sehingga hal itu pula menggambarkan bahwa pengelolaan keuangan APBD Kabupaten Sekadau belum dianggarkan dengan optimal sebab berdasarkan rumus efisiensi hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah Kabupaten Sekadau masih “ kurang efisien “ secara keseluruhan berdasarkan ke 7 (tujuh) sampel yang ada. Dengan begitu penulis berasumsi bahwa pengeluaran yang dilakukan daerah tidak dianggarkan dengan baik dan program-program yang ditetapkan kurang relevan dengan kebutuhan daerah yang seharusnya didahulukan.

Statistik Deskriptif

Hasil analisis statistik deskriptif ditunjukkan pada tabel berikut ini:

Tabel 8
Statistik Deskriptif

<i>Descriptive Statistics</i>					
	<i>N</i>	<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>	<i>Mean</i>	<i>Std. Deviation</i>
KKD	7	.85	1.06	.9743	.06321
RKD	7	.06	.11	.0743	.01988
PBD	7	.94	1.17	1.0286	.06986
Valid N (listwise)	7				

Sumber: *Data BPKAD Kabupaten Sekadau diolah, 2022*

Tabel 8 di atas tersebut memperlihatkan hasil analisis statistik deskriptif pada Rasio Kemandirian Daerah (RKD) yang menyatakan nilai minimum sebesar 0,06 dan nilai maksimum sebesar 0,11 dengan nilai mean yaitu 0,0743 dan standar deviasi 0,01988. Nilai yang minimum terjadi pada tahun 2015, 2016, 2019 dan 2021, dalam hal ini menunjukkan bahwa pada tahun tersebut Pemda Kabupaten Sekadau memiliki tingkat kemandirian daerah yang paling rendah daripada tahun yang lain. Akan tetapi, nilai maksimum berada pada tahun 2017 yang menyatakan jika pada tahun tersebut tingkat kemandirian mengalami kenaikan, namun tetap saja masih dalam kriteria yang “rendah sekali”. Hasil statistik deskriptif pada Pengelolaan Belanja Daerah (PDB) menyatakan nilai minimum sebesar 0,94 dan nilai maksimum sebesar 1,17 dengan nilai mean sebesar 1,0286 serta nilai standar deviasi sebesar 0,06986. Nilai minimum berada pada tahun 2016, hal ini menyatakan bahwa Kabupaten Sekadau memiliki tingkat efektivitas yang rendah dalam hal pengelolaan belanja daerah jika dilihat dari besaran belanja yang dilakukan hampir setara dengan total penerimaan daerahnya. Sedangkan, nilai maksimum terjadi pada tahun 2019 yang menyatakan bahwa tingkat efektif yang paling rendah dibanding tahun yang lainnya sebab besaran nilai belanja melebihi nilai total dari pendapatan yang diperoleh.

Hasil analisis statistik deskriptif pada Kinerja Keuangan Daerah (KKD) Kabupaten Sekadau menyatakan bahwa nilai minimum 0,85 dan nilai maksimum 1,06 dengan nilai mean 0,9743 dan standar deviasi 0,06321. Nilai minimum berada pada tahun 2019, hal itu menyatakan jika Kabupaten Sekadau

pada tahun tersebut memperoleh nilai kinerja keuangan yang cukup efisien dibandingkan tahun-tahun lain. Namun nilai maksimum terdapat pada tahun 2016 yang menunjukkan jika Kabupaten Sekadau memperoleh nilai yang tidak efisien dalam kinerja keuangan dibanding tahun-tahun lain.

Statistik Inferensial

Penelitian ini dilakukan spesifikasi model yang diperuntukkan guna menguji variabel independen yang terdiri dari Rasio Kemandirian Daerah dan Pengelolaan Belanja Daerah, apakah terdapat pengaruh terhadap variabel dependen, yaitu Kinerja Keuangan Daerah. Dari hasil olah data yang digunakan dengan bantuan aplikasi SPSS berikut adalah analisis regresi linear berganda dalam penelitian ini yang diperoleh hasil perhitungan dalam tabel 9 berikut ini:

Tabel 9
Regresi Linier Berganda

<i>Coefficients^a</i>						
<i>Model</i>		<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	<i>t</i>	<i>Sig.</i>
		<i>B</i>	<i>Std. Error</i>	<i>Beta</i>		
1	(Constant)	1.911	.026		73.773	.000
	RKD	-.059	.082	-.019	-.720	.511
	PBD	-.907	.023	-1.002	-38.819	.000

a. *Dependent Variable: KKD*

Sumber: *Data BPKAD Kabupaten Sekadau diolah, 2022*

Berdasarkan tabel 9 di atas maka dinyatakan model analisis sebagai berikut:

$$KKD = 1,911 - 0,059 \text{ RKD} - 0,907 \text{ PBD} + e$$

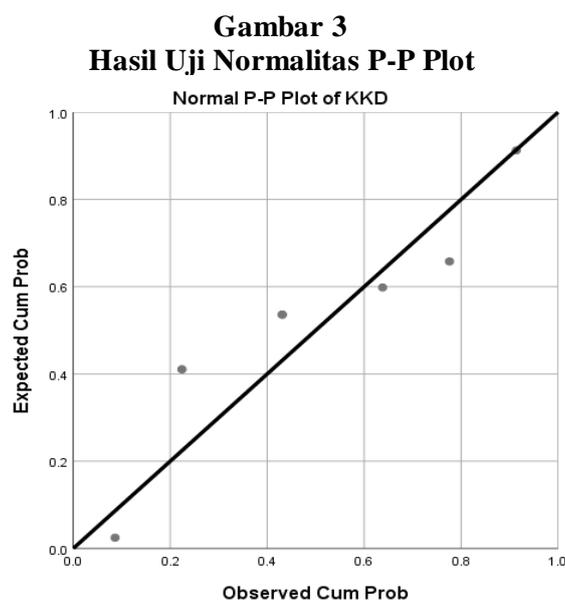
Persamaan di atas bisa menyatakan nilai konstanta sebesar 1,911. Oleh karena nilai konstanta bertanda positif, hal itu menyatakan bahwa seluruh variabel bebas dianggap konstan, dengan begitu maka variabel kinerja keuangan daerah akan terjadi kenaikan sebesar 1,911. Dari persamaan di atas dapat dilihat bahwa nilai koefisien bertanda negatif, maka hal tersebut menunjukkan tidak ada hubungan yang sama/searah antara variabel Rasio Kemandirian Daerah dan Pengelolaan Belanja daerah dengan variabel Kinerja Keuangan Daerah. Nilai koefisien regresi variabel Rasio Kemandirian Daerah (RKD) sebesar – 0,059, hal ini menggambarkan bahwa apabila terjadi peningkatan rasio kemandirian daerah sebesar 1 satuan, maka dengan begitu kinerja pemerintah daerah akan mengalami penurunan sebesar – 0,059 satuan dengan asumsi variabel independen lainnya konstan. Begitupun sebaliknya, jika yang terjadi penurunan rasio kemandirian daerah sebesar 1 satuan, maka kinerja pemerintah daerah akan mengalami kenaikan sebesar 0,059 satuan, juga dengan asumsi variabel independen lainnya konstan.

Pengelolaan Belanja daerah mempunyai nilai koefisien regresi sebesar $-0,907$ hal itu memiliki makna bahwa apabila pengelolaan belanja daerah naik 1 satuan maka kinerja pemerintah daerah akan turun sebesar $-0,907$ dengan asumsi variabel lain konstan. Begitu juga sebaliknya, apabila pengelolaan belanja daerah mengalami penurunan 1 satuan maka kinerja pemerintah daerah akan naik sebesar $0,907$ satuan, juga dengan asumsi variabel lain konstan.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Sebaran sebuah data dapat diketahui melalui uji normalitas, sebab uji ini berfungsi untuk menguji setiap variabel independen dan dependen apakah terdistribusi secara normal, yang berarti dalam uji ini setiap variabel harus memiliki distribusi normal sehingga data dalam penelitian ini bisa dikatakan layak. Berikut ini uji normalitas dengan grafik *Probability plot*



Sumber: Data BPKAD Kabupaten Sekadau diolah, 2022

Pengujian normalitas yang diperlihatkan dalam gambar grafik *Probability plot* menunjukkan hasil bahwa data tersebut mengikuti arah garis diagonal dan data menyebar di sekitar garis diagonal. Dengan demikian maka bisa diambil simpulan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini layak sebab telah terdistribusi secara normal. Hasil uji normalitas di atas didukung dengan nilai *kolmogorov smirnov Z* pada tabel di bawah ini yang menunjukkan nilai sebesar $0,196$ dengan tingkat signifikan $0,200$. Dengan demikian hal tersebut memperlihatkan bahwa variabel pada penelitian ini terdistribusi

normal sebab tingkat signifikasinya yang diperoleh sebesar 0,200 yang memiliki arti bahwa angka tersebut lebih besar dibandingkan 0,05, dengan demikian maka bisa diambil kesimpulan bahwa Rasio Kemandirian Daerah (RKD), Pengelolaan Belanja Daerah (PBD) dan Kinerja Keuangan Daerah (KKD) berdistribusi normal.

Tabel 10
Uji Normalitas *Kolmogorov-Smirnov*

<i>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</i>		
		<i>Unstandardized Residual</i>
N		7
<i>Normal Parameters^{a,b}</i>	<i>Mean</i>	.0000000
	<i>Std. Deviation</i>	.00320567
<i>Most Extreme Differences</i>	<i>Absolute</i>	.196
	<i>Positive</i>	.196
	<i>Negative</i>	-.190
<i>Test Statistic</i>		.196
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>		.200 ^{c,d}

Sumber: Data BPKAD Kabupaten Sekadau diolah, 2022

Uji Autokorelasi

Uji yang diterapkan guna mengetahui apakah ada atau tidaknya suatu penyimpangan dalam asumsi klasik autokorelasi, yakni korelasi yang terjadi antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lainnya yang terdapat pada model regresi. Metode pengujian yang diterapkan pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan *Durbin-Watson* yang hasilnya bisa dilihat pada table 11 di bawah ini:

Tabel 11
Uji Autokorelasi

<i>Model Summary^b</i>					
<i>Model</i>	<i>R</i>	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Std. Error of the Estimate</i>	<i>Durbin-Watson</i>
1	.999 ^a	.997	.996	.00393	1.945
<i>a. Predictors: (Constant), PBD, RKD</i>					
<i>b. Dependent Variable: KKD</i>					

Sumber: Data BPKAD Kabupaten Sekadau diolah, 2022

Kriteria yang digunakan untuk menyatakan ada tidaknya autokorelasi pada penelitian ini dilakukan dengan Uji *Durbin-Watson*, berdasarkan tabel *Durbin-Watson* penulis, yakni jika pengujian diperoleh nilai *Durbin-Watson* tidak kurang dari 0,4672 dan lebih besar dari 1,8964 maka hal tersebut berarti bahwa tidak terjadi autokorelasi. Tabel 11 di atas menyatakan bahwa nilai *Durbin-Watson*

sebesar 1,945. Maka dari itu nilai *Durbin-Watson* diketahui angka perolehannya tidak kurang dari 0,4672 dan lebih besar dari 1,8964 atau $0,4672 < 1,945 > 1,8964$ sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwa tidak terjadi autokolerasi dalam model regresi ini.

Uji Multikolinearitas

Uji yang diterapkan guna memberikan kepastian apakah pada sebuah model regresi ada terjadi interkorelasi atau terjadinya kolinearitas antar variabel bebas. Interkorelasi diartikan sebagai hubungan yang linear atau hubungan yang kuat antara satu variabel bebas dengan variabel bebas lainnya di dalam sebuah model regresi. Interkorelasi tersebut bisa dilihat dari nilai koefisien korelasi antar nilai VIF (*Varians Inflation Factor*) dan *Tolerance* dengan ketentuan nilai *tolerance* semua variabel independen harus lebih besar dari 0,1, dan nilai VIF pada *Collinearity Statistic* harus lebih kecil dari 10.

Tabel 12
Uji Multikolinearitas

<i>Coefficients^a</i>		
<i>Model</i>	<i>Collinearity Statistics</i>	
	<i>Tolerance</i>	<i>VIF</i>
1		
(Constant)		
RKD	.965	1.036
PBD	.965	1.036

a. *Dependent Variable: KKD*

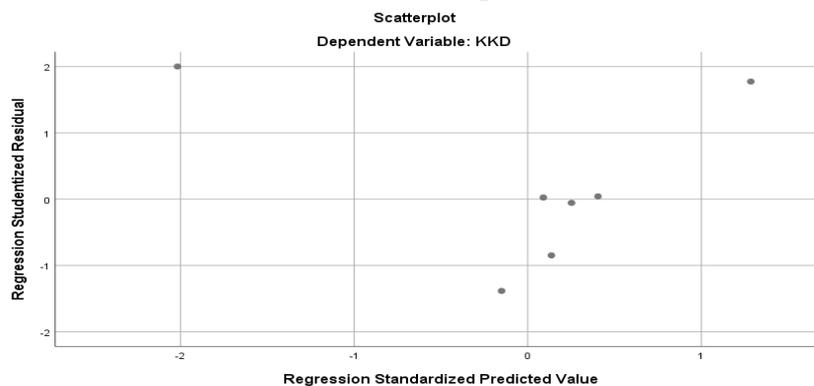
Sumber: Data BPKAD Kabupaten Sekadau diolah, 2022

Tabel 12 di atas menunjukkan jika nilai *tolerance* kedua variabel yaitu RKD sebesar 0,965 dan variabel PDB juga sebesar 0,965. Sedangkan nilai *Varians Inflation Factor* (VIF) kedua variabel RKD dan PDB memiliki nilai yang sama yaitu sebesar 1,036. Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa angka *tolerance* kedua variabel baik itu rasio kemandirian daerah dan belanja daerah memiliki nilai di atas 0,1 dan nilai *Varians Inflation Factor* (VIF) kurang dari 10, sehingga dengan begitu dapat dipastikan bahwa antar variabel independen yang satu dengan variabel independen lainnya dalam model regresi penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Uji ini diterapkan guna mengetahui apakah model regresi terjadi perbedaan atau ketidaksamaan *variance* dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians berbeda, maka bisa dikatakan heteroskedastisitas. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya tidak berubah dan tetap, maka bisa disebut homoskedastisitas. Hasil uji heteroskedastisitas bisa dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 4
Grafik Scatterplot



Sumber: Data BPKAD Kabupaten Sekadau diolah, 2022

Model regresi yang layak adalah jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya tidak berubah dan tetap (homoskedastisitas) atau dengan tidak terjadi perubahan/perbedaan (heteroskedastisitas). Grafik *scatterplot* pada gambar di atas bisa dilihat bahwa titik-titik menyebar secara *random* baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y dan tidak membentuk pola tertentu, maka bisa dikatakan jika data dalam penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji Kelayakan Model

Uji R²

Terdapat analisis pada nilai koefisien determinasi dalam penelitian ini yang dinyatakan pada hasil analisis regresi linier berganda pada Tabel di bawah ini:

Tabel 13
Uji R²

<i>Model Summary^b</i>				
<i>Model</i>	<i>R</i>	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Std. Error of the Estimate</i>
1	.999 ^a	.997	.996	.00393
<i>a. Predictors: (Constant), PBD, RKD</i>				
<i>b. Dependent Variable: KKD</i>				

Sumber: Data BPKAD Kabupaten Sekadau diolah, 2022

Tabel Uji R² di atas menyatakan jika nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,996 yang memiliki arti bahwa variabel independen yang terdiri dari Rasio Kemandirian Daerah (RKD) dan Pengelolaan Belanja Daerah (PBD) secara simultan berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah sebesar 99,6%. Sedangkan sisanya 100% - 99,6% = 0,04% adalah hal lainnya yang menunjukkan jika masih terdapat variabel lain yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan daerah Kabupaten Sekadau.

Uji F

Uji F ialah uji kelayakan model yang diterapkan guna menguji apakah model regresi memiliki pengaruh signifikan pada model penelitian yang layak untuk diuji. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan tabel ANOVA dengan tingkat signifikansi sebesar 0,05 ($\alpha=5\%$). Jika nilai Sig F < 0,05, maka menunjukkan bahwa model regresi layak digunakan dalam model penelitian ini. Berikut ini adalah hasil dari uji F tersebut:

Tabel 14
Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.024	2	.012	775.563	.000 ^b
	Residual	.000	4	.000		
	Total	.024	6			
a. Dependent Variable: KKD						
b. Predictors: (Constant), PBD, RKD						

Sumber: Data BPKAD Kabupaten Sekadau diolah, 2022

Pengolahan data tersebut menyatakan nilai F sebesar 775,563 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Hal itu menunjukkan jika model regresi dalam penelitian ini layak untuk digunakan sebab memiliki tingkat signifikansi lebih kecil atau kurang dari pada 0,05.

Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis pada penelitian ini adalah Uji T, diterapkan guna mengetahui pengaruh antar masing-masing variabel independen terhadap dependen. Guna menguji tingkat signifikansi uji hipotesis maka dilakukan dengan signifikansi sebesar 0,05 ($\alpha=5\%$). Yang menjadi kriteria diambilnya keputusan terhadap hasil uji t ini ialah sebagai berikut:

Apabila nilai signifikansi uji t < 0,05 maka variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen

Apabila nilai signifikansi uji t > 0,05 maka variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Tabel 15
Uji Hipotesis

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.911	.026		73.773	.000

	RKD	-.059	.082	-.019	-.720	.511
	PBD	-.907	.023	-1.002	-38.819	.000
<i>a. Dependent Variable: KKD</i>						

Sumber: Data BPKAD Kabupaten Sekadau diolah, 2022

Berdasarkan hasil pengujian tabel 15 di atas memperlihatkan hasil pengujian hipotesis penelitian ini, yaitu:

Pengaruh Rasio Kemandirian Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah. Dari hasil analisis tersebut menunjukkan nilai t sebesar - 0,720 dan tingkat signifikansi sebesar 0,511 > 0,05. Yang mengandung makna bahwa secara parsial rasio kemandirian daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Dengan demikian, uji t ini tidak mendukung hipotesis yang pertama bahwa rasio kemandirian daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah Kabupaten Sekadau.

Pengaruh Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah. Dari hasil analisis tersebut menunjukkan nilai t sebesar - 38,819 dan nilai signifikansi sebesar 0,00 < 0,05. Yang mengandung makna bahwa secara parsial belanja daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Dengan demikian, uji t mendukung hipotesis yang kedua bahwa belanja daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah Kabupaten Sekadau.

Hasil dan Pembahasan

Pengaruh Variabel X1 (Rasio Kemandirian Daerah) terhadap Variabel Y (Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau).

Temuan pertama menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan atas variabel X1 (rasio kemandirian daerah) terhadap variabel Y (kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Sekadau) secara parsial yaitu dengan besaran pengaruh sebesar – 0,059, sebab nilai signifikansi yang diperoleh lebih besar dari 0,05 yakni 0,511 sehingga membuat hipotesis H1 dalam penelitian ini ditolak. Selain itu terdapat hubungan pengaruh yang tidak searah karena pada *coefficients Beta* menunjukkan nilai yang minus.

Data RKD Kabupaten Sekadau menunjukkan nilai rasio yang rendah yang berarti nilai tersebut berpengaruh terbalik kepada nilai KKD yang justru menjadi tinggi. Sedangkan pada tabel 2 kriteria kemandirian daerah dijelaskan bahwa semakin tinggi nilai rasio kemandirian maka semakin baik kinerja keuangannya sebab nilai rasio dari kinerja keuangan mengalami penurunan, yang jika dikaitkan dengan kriteria kinerja keuangan pada tabel 1 yang menyatakan bahwa semakin kecil nilai rasio kinerja keuangan maka semakin baik kinerja keuangan suatu

pemerintah daerah. Berdasarkan hasil penelitian ini, pemerintah Kabupaten Sekadau memiliki nilai rasio kemandirian yang rendah, maka nilai kinerja keuangannya menjadi tinggi, dan semakin besar nilai rasio kemandirian maka semakin rendah nilai kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Sekadau. Nilai dari rasio kemandirian daerah dan kinerja keuangan tersebut membuktikan bahwa pemerintah Kabupaten Sekadau tidak mandiri dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahannya dan mencukupi kebutuhannya serta tidak efisien dalam kinerja keuangannya. Hasil penelitian yang dilakukan penulis tidak mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Anynda dan Hermanto (2020) yang berhasil membuktikan bahwa secara parsial rasio kemandirian daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah.

Pengaruh Variabel X2 (Belanja Daerah) terhadap Variabel Y (Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau)

Temuan berikutnya menyatakan bahwa variabel X2 (belanja daerah) secara parsial berpengaruh sebesar -0,907 terhadap variabel Y (kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Sekadau) dengan nilai signifikansi 0,000 (kurang dari 0,05) artinya hubungan pengaruh tersebut adalah signifikan, tanda minus pada *coefficients Beta* memiliki makna bahwa adanya pengaruh hubungan yang tidak searah. Sehingga dalam penelitian ini, H2 di terima.

Hasil penelitian juga mengartikan bahwa perubahan kenaikan maupun penurunan jumlah belanja daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah baik itu kurang dari ataupun melebihi total pendapatan daerah akan mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Sekadau. Sebab semakin besar belanja yang dilakukan daerah yang besarnya melebihi total pendapatan daerah maka berdasarkan rumus efisiensi kinerja keuangan daerah dapat dikatakan hal tersebut kurang efisien, begitupun sebaliknya. Hubungan yang berpengaruh itu dapat terjadi karena belanja yang dilakukan daerah berdampak kepada stabilitas keuangan daerah yang mana hal tersebut berkaitan dengan pengelolaan APBD untuk kemajuan dan kesejahteraan daerah dilihat dari perspektif keuangan. Hal ini tidak sejalan dengan hasil penelitian Dessy Ari Permatasari, Sri Trisnaningsih (2022), yakni Pengelolaan Belanja Daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah. Pengaruh pengelolaan belanja daerah terhadap kinerja keuangan daerah menunjukkan bahwa semakin pemerintah daerah secara optimal menekan biaya realisasi belanja, maka dapat berimplikasi kepada kinerja keuangan daerah.

Pengaruh Variabel X1 (Rasio Kemandirian Daerah) dan Variabel X2 (Belanja Daerah) secara simultan terhadap Variabel Y (Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Sekadau)

Berdasarkan tabel 13 menunjukkan nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,996 yang memiliki makna bahwa variabel X1 (Rasio Kemandirian Daerah) dan Variabel X2 (Belanja Daerah) secara simultan berpengaruh terhadap Variabel Y (kinerja keuangan daerah) yakni sebesar 99,6%. Sedangkan sisanya $100\% - 99,6\% = 0,04\%$ adalah hal lainnya diluar penelitian ini yang menunjukkan jika masih terdapat variabel lain yang dapat memberi pengaruh kinerja keuangan daerah Kabupaten Sekadau. Hasil ini mendukung penelitian sebelumnya dari Anynda dan Hermanto (2020) penelitiannya yaitu Pengaruh Rasio Kemandirian Daerah, Efektifitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Pengelolaan Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah. Hasil penelitian secara parsial baik rasio kemandirian daerah, efektivitas PAD dan pengelolaan belanja daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah. Secara simultan semua variabel independek berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah sebesar 79,3%”

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari pembahasan pada penelitian ini, diperoleh kesimpulan bahwa

- tingginya rasio kemandirian daerah yang dilihat dari persentase nilai rasio kemandirian daerah belum mampu membuat peningkatan pada nilai kinerja keuangan;
- berdasarkan hasil penelitian bahwa pemerintah Kabupaten Sekadau yang nilai rasio pengelolaan belanja daerahnya yang tinggi, maka nilai kinerja keuangan pemerintah daerahnya menjadi rendah, dan semakin kecil nilai rasio pengelolaan belanja daerahnya maka semakin tinggi pula nilai kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Sekadau. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah Kabupaten Sekadau tidak efektif dalam mengelola belanja daerahnya;
- Secara simultan (bersama) Variabel X1 (Rasio Kemandirian Daerah) dan Variabel X2 (Belanja Daerah) berpengaruh terhadap Variabel Y (kinerja keuangan daerah Kabupaten Sekadau) dengan pengaruh sebesar 99,6%.

Saran

Berdasarkan temuan penelitian yang telah disimpulkan atas rumusan masalah yang ada, adapun saran yang diberikan a) hendaknya pemerintah daerah Kabupaten Sekadau memaksimalkan pemungutan PAD; b) mengoptimalkan pengelolaan Belanja Daerahnya, sebab berdasarkan hasil penelitian ini apabila realisasi pendapatan dan realisasi pengeluaran memiliki perbandingan yang besar maka berdampak baik kepada nilai kinerja keuangan daerah; dan c) bagi peneliti berikutnya diharapkan dapat menjadi referensi tambahan untuk penelitian sejenis dimasa yang akan datang dengan menambahkan variabel lainnya yang bersifat non keuangan seperti jumlah penduduk dan jumlah pegawai sehingga hasil penelitian lebih representatif dan juga bisa menggunakan data pada tingkat provinsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anynda, N. S., & Hermanto, S. B. (2020). Pengaruh rasio kemandirian daerah, efektifitas pendapatan asli daerah, dan pengelolaan belanja daerah terhadap kinerja keuangan daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 1–20.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23*. Badan Penerbit.
- Halim, A. (2012). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah (4 ed.)*. Salemba Empat.
- Hamzah, A. (2007). Analisis Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, dan Kemiskinan: Pendekatan Analisis Jalur (Studi pada 29 Kabupaten dan 9 Kota di Provinsi Jawa Timur Periode 2001-2006). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*. 4(2): 211-228.
- Mahmudi. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. UPP STIM YKPN.
- Moenek, Suwanda, dan R. (2020). *Dasar-Dasar Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual*. Remaja Rosdakarya.
- Permatasari, D. A., & Trisnaningsih, S. (2022). Pengaruh Kemandirian, Efektifitas Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 22(3), 1573. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v22i3.2581>
- Sari, B. I., & Wati, H. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 3(1), 1–11. <https://doi.org/10.24036/jea.v3i1.356>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta.
- Welly, W., & Djuniar, L. (2017). Kinerja keuangan pemerintah provinsi sumatera selatan berdasarkan anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd) tahun 2009-2015. *Jurnal Ekonomi*, 22(1), 1–21. <https://doi.org/10.24912/je.v22i1.178>
- Widiyanto, M. . (2013). *Statistika Terapan. Konsep Dan Aplikasi Dalam Penelitian Bidang Pendidikan, Psikologi Dan Ilmu Sosial Lainnya*. Elex Media Komputindo.